

## Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

**Marliana Azizah\***

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

\*[marlianaazizah.id@gmail.com](mailto:marlianaazizah.id@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine the regional financial performance of 13 regencies and cities in South Kalimantan Province and the difference before and during the Covid-19 during 2018–2021. This study applies a descriptive quantitative approach with regional financial ratio analysis, which includes the fiscal decentralization ratio, the regional financial independence ratio, the effectiveness ratio, the efficiency ratio, and the compatibility ratio. The data source is Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. The resulting findings are that regional financial performance in 13 regions tends to experience pressure during the covid-19 pandemic compared to the previous period. the fiscal decentralization ratio has an average of 13 regencies and has increased by 2.2%, the regional financial independence ratio has increased by 3%, the effectiveness ratio has increased by 6%, and the efficiency ratio has increased by 8.5%. The compatibility ratio consisting of the operating and the capital expenditure ratios decreased by -1.3% and -3.3%.*

**Keywords:** Covid-19 Pandemic; Regional Financial Performance; Regional Financial Ratios

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan serta perbedaannya sebelum dan saat pandemi covid-19 tahun 2018-2021. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan daerah yang meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian. Sumber data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Temuan yang dihasilkan adalah kinerja keuangan daerah di 13 kabupaten dan kota cenderung mengalami tekanan pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata 13 kabupaten dan kota dari sebelum pandemi covid-19 ke saat pandemi covid-19 mengalami kenaikan sebesar 2,2%, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan 3%, rasio efektivitas PAD mengalami peningkatan 6%, rasio efisiensi keuangan daerah mengalami peningkatan 8,5%. Pada rasio keserasian yang mencakup rasio belanja operasi dan rasio belanja modal mengalami penurunan sebesar -1,3% dan -3,3%.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19; Kinerja Keuangan Daerah; Rasio Keuangan Daerah

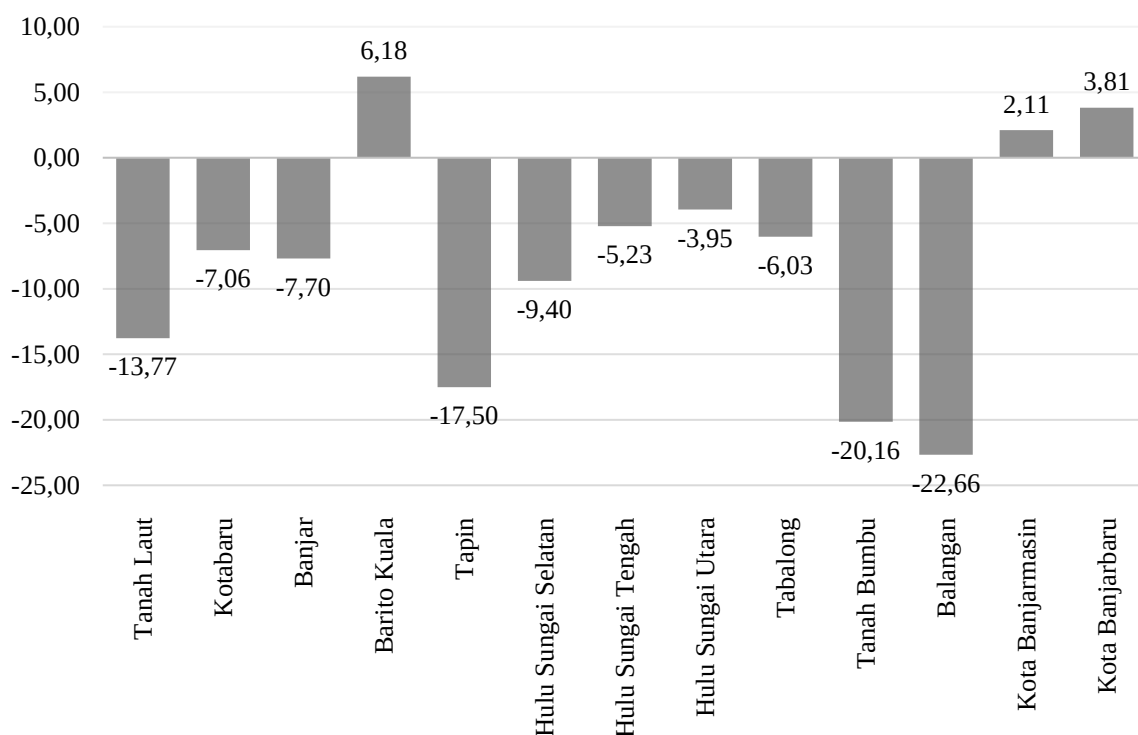
### **PENDAHULUAN**

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian global termasuk Indonesia. Kebijakan keuangan negara dan fiskal sangat diperlukan untuk menghadapi risiko munculnya pandemi covid-19, seperti meningkatnya belanja dalam bidang kesehatan, pelayanan masyarakat, dan aktivitas usaha. Kebijakan fiskal dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik serta dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan (Sudirman, 2017). Kebijakan fiskal dibuat untuk mempengaruhi perekonomian dan menjaga

keseimbangan ekonomi negara dengan meningkatkan atau menurunkan anggaran atau pendapatan negara yang dikelola oleh pemerintah (Feranika dan Haryati, 2020). Pemerintah dapat menentukan besaran pendapatan atau anggaran yang dikeluarkan pada suatu program yang dibuat atau direncanakan. Pemerintah merencanakan berbagai kebijakan fiskal dalam menghadapi pandemi covid-19 untuk keberlangsungan perekonomian Indonesia. Salah satu kebijakan dalam menghadapi pandemi covid-19 yaitu meluncurkan *refocusing* anggaran dengan memprioritaskan pengeluaran yang berhubungan dengan pandemi covid-19 (Mirani dkk., 2021).

Pandemi covid-19 mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah pada sisi pendapatan dan pengeluaran yang mengakibatkan terjadinya defisit dan beban utang meningkat (OECD, 2020). Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan dalam otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengurus rumah tangganya baik itu dalam pembiayaan maupun pendapatan. Dalam konteks krisis pandemi covid-19, pemerintah daerah berdebat tentang apa yang harus diutamakan antara kesehatan atau ekonomi dimana ekonomi berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu dengan persoalan pendapatan daerah (Arfah dkk., 2021).

Berikut adalah persentase perubahan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019-2020:

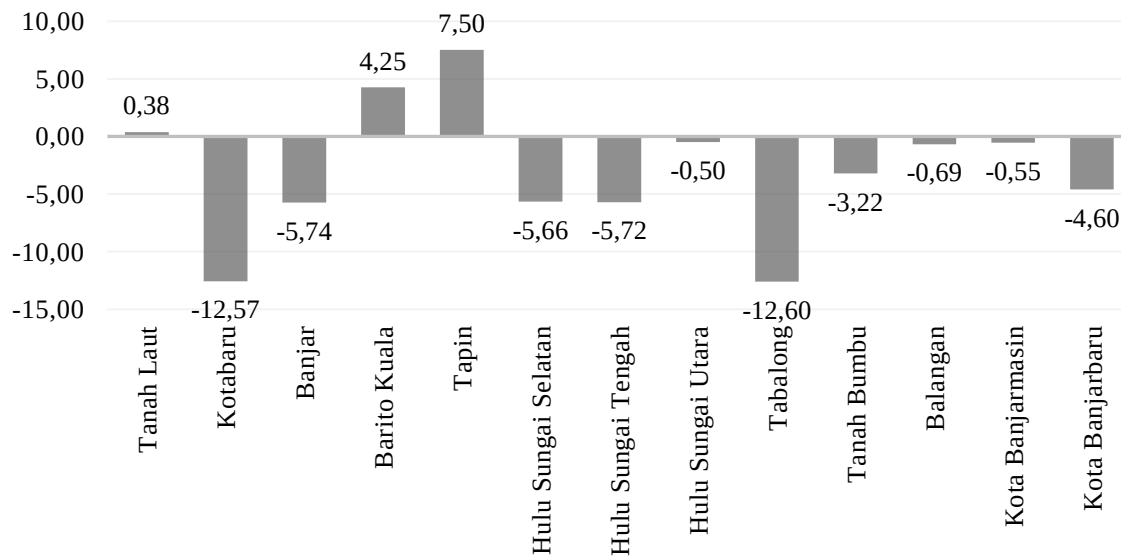


**Gambar 1. Persentase Perubahan Total Pendapatan Daerah, 2019-2020**

Sumber: DJPK, Diolah Kembali

Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada gambar 1, terjadi penurunan total pendapatan daerah di 10 kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19) sampai tahun 2020 (saat pandemi covid-19). Persentase penurunan paling besar di Kabupaten Balangan yaitu sebesar -22,66%. Sedangkan 3 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan total pendapatan daerah.

Berikut adalah persentase perubahan belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019-2020:



**Gambar 2. Persentase Perubahan Total Belanja Daerah, 2019-2020**

Sumber: DJPK, Diolah Kembali

Berdasarkan Gambar 2, total belanja daerah mengalami penurunan di 10 Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Penurunan total belanja daerah paling besar di Kabupaten Tabalong, yaitu sebesar -12,60%. Sedangkan 3 kabupaten mengalami kenaikan belanja daerah.

Keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban suatu pemerintah daerah berupa uang yang dimanfaatkan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah (Yayu dan Saipudin, 2022). Otonomi daerah mendorong pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan publik (Nasrum, (2018), Syauqi dkk., (2019), Nalle dkk., (2021), Hasnita, (2021)). Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sehingga keuangan daerah berperan penting dalam pembangunan daerah.

Salah satu metode untuk mengukur kinerja pemerintah yaitu menggunakan analisis kinerja keuangan daerah karena menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan daerah mengelola urusan daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah tercermin dalam capaian kerja terkait pengelolaan keuangan daerah periode tertentu termasuk aspek penerimaan, belanja daerah, dan indikator keuangan yang diatur oleh perundang-undangan (Kamaluddin, (2018), Sartika, (2019), Puteri & Sa'roni, (2019), Pasaribu, (2021)). Hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Farhani dan Rosnidah, 2018).

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan daerah 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan perbedaannya sebelum dan saat pandemi covid-19?

## PENELITIAN TERDAHULU

Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, dan Pingkan F. Rorong (2021) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah saat pandemi covid-19 mengalami penurunan tetapi hasilnya tidak signifikan. Penelitian Onibala dkk. menganalisis perbedaan sebelum dan saat pandemi tahun 2019 dan 2020 pada satu daerah, sedangkan penelitian ini menganalisis perbedaan kinerja tahun 2018-2021 pada 13 daerah.

Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, dan Rini Hidayah (2021) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan dimana pada masa pandemi covid-19 mengalami perbaikan meskipun belum benar-benar

mandiri dalam kemandirian keuangan. Penelitian Habibi dkk. menggunakan metode sensus dan sampling jenuh serta alat analisis uji beda, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan selisih rata-rata indikator kinerja saat pandemi dikurangi sebelum pandemi covid-19.

Fitri Rahmawati dan Endang Kiswara (2022) dengan judul Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia) menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi covid-19 pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dan rasio belanja modal serta tidak mengalami perbedaan signifikan pada rasio kemandirian keuangan dan rasio iuran retribusi. Penelitian Rahmawati dan Kiswara menggunakan teknik analisis *Paired t-test*, sedangkan penelitian ini menggunakan selisih rata-rata indikator kinerja saat pandemi dikurangi sebelum pandemi covid-19.

Demvi Vebiani, Nugraha, Rd Dian Hardiana (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat) menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan selama pandemi covid-19 pada rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan, sementara tidak ada perbedaan pada rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Penelitian Vebiani dkk. menggunakan teknik analisis *Paired t-test*, sedangkan penelitian ini menggunakan selisih rata-rata indikator kinerja saat pandemi dikurangi sebelum pandemi covid-19.

Mutia Agnika, Sugih Sutrisno Putra, dan Sudrajat (2021) dengan judul Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja APBD saat pandemi covid-19 pada rasio kemandirian tergolong sangat rendah, rasio efektivitas tergolong cukup efektif, rasio efisiensi keuangan daerah tergolong tidak efisien, rasio kesesuaian didominasi rasio belanja operasional, serta rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan negatif. Penelitian Agnika dkk. menganalisis perbedaan sebelum dan saat pandemi covid-19 tahun 2019 dan 2020 pada satu daerah, sedangkan penelitian ini menganalisis perbedaan kinerja tahun 2018-2021 pada 13 daerah.

## METODE

Ruang lingkup penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah dari 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 4 tahun yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni sebelum pandemi covid-19 pada tahun 2018 dan 2019, dan saat pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Data penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan daerah, yaitu:  
Pertama, rasio derajat desentralisasi fiskal dengan rumus:

$$DDF_{TD} = \frac{PAD_{TD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}_{TD}} \times 100\%$$

Kedua, rasio kemandirian keuangan daerah dengan rumus:

$$KKD_{TD} = \frac{PAD_{TD}}{\text{Bantuan Transfer Pusat atau Provinsi+Pinjaman}_{TD}} \times 100\%$$

Ketiga, rasio efektivitas PAD dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas}_{TD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan } PAD_{TD}}{\text{Target Penerimaan } PAD_{TD}} \times 100\%$$

Keempat, rasio efisiensi keuangan daerah dengan rumus:

$$REKD_{TD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}_{TD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}_{TD}} \times 100\%$$

Kelima, rasio keserasian dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Operasi}_{TD} = \frac{\text{Totsl Belanja Operasi}_{TD}}{\text{Totsl Belanja Daerah}_{TD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal}_{TD} = \frac{\text{Totsl Belanja Modal}_{TD}}{\text{Totsl Belanja Daerah}_{TD}} \times 100\%$$

Perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan saat pandemi covid-19 dilakukan perhitungan rata-rata kinerja setiap indikator keuangan daerah sebelum dan saat pandemi covid-19 pada setiap daerah dengan rumus:

$$\Delta DDF_D = DDF_{PD} - DDF_{ND}$$

$$\Delta KKD_D = KKD_{PD} - KKD_{ND}$$

$$\Delta \text{Rasio Efektivitas}_D = \text{Rasio Efektivitas}_{PD} - \text{Rasio Efektivitas}_{ND}$$

$$\Delta REKD_D = REKD_{PD} - REKD_{ND}$$

$$\Delta RBO_D = RBO_{PD} - RBO_{ND}$$

$$\Delta RBM_D = RBM_{PD} - RBM_{ND}$$

Keterangan

$\Delta$  : Perbedaan kinerja saat dan sebelum pandemi covid-19

D : Daerah; nama kabupaten/kota D

PD : Rata-rata kinerja keuangan daerah kabupaten/kota D saat pandemi

ND : Rata-rata kinerja keuangan daerah kabupaten/kota D saat ekonomi normal

$$\text{Rumus PD} = \frac{\text{Indikator Kinerja 2020} + \text{Indikator Kinerja 2021}}{2}$$

$$\text{Rumus ND} = \frac{\text{Indikator Kinerja 2018} + \text{Indikator Kinerja 2019}}{2}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Pandemi Covid-19

Analisis kinerja keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan daerah tersebut dalam mengelola keuangan, melaksanakan program-program pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil perhitungan pada tabel 1 dibawah ini, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum pandemi covid-19 menjelaskan bahwa 8 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong sangat kurang, 4 Kabupaten dan Kota dalam kategori kurang, dan yang termasuk kategori cukup hanya Kota Banjarbaru. Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum pandemi covid-19 pada 13 daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 10,8% termasuk dalam kategori kurang. Hasil analisis rasio keuangan daerah sebelum pandemi covid-19 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Rata-Rata Rasio Keuangan Daerah Sebelum Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2019**

| Kabupaten/Kota           | DDF (%)     | KKD (%)     | Efektivitas PAD (%) | REKD (%)    | RBO (%)     | RBM (%)     |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kab. Tanah Laut          | 9           | 10          | 122                 | 86          | 66          | 20          |
| Kab. Kotabaru            | 9           | 10          | 92                  | 100         | 66          | 19          |
| Kab. Banjar              | 11          | 14          | 117                 | 98          | 66          | 17          |
| Kab. Barito Kuala        | 7           | 8           | 141                 | 99          | 61          | 22          |
| Kab. Tapin               | 7           | 9           | 136                 | 87          | 65          | 20          |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | 11          | 12          | 106                 | 95          | 63          | 23          |
| Kab. Hulu Sungai Tengah  | 9           | 11          | 82                  | 94          | 64          | 19          |
| Kab. Hulu Sungai Utara   | 10          | 11          | 115                 | 99          | 63          | 18          |
| Kab. Tabalong            | 11          | 13          | 94                  | 99          | 64          | 23          |
| Kab. Tanah Bumbu         | 10          | 11          | 104                 | 92          | 65          | 22          |
| Kab. Balangan            | 5           | 6           | 132                 | 92          | 63          | 22          |
| Kota Banjarmasin         | 19          | 24          | 98                  | 98          | 75          | 24          |
| Kota Banjarbaru          | 22          | 29          | 126                 | 100         | 71          | 29          |
| <b>Rata-Rata</b>         | <b>10,8</b> | <b>12,9</b> | <b>112,7</b>        | <b>95,3</b> | <b>65,5</b> | <b>21,4</b> |

Sumber: (DJPK, Hasil Olah Data)

Pada rasio kemandirian keuangan daerah, 12 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah berada pada rentang 0-25%, sedangkan Kota Banjarbaru termasuk dalam kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebelum pandemi covid-19 sebesar 12,9% termasuk dalam kategori rendah sekali.

Kemudian pada rasio efektivitas PAD terdapat 9 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kategori efektif. Sedangkan 4 kabupaten dan kota termasuk dalam kategori tidak efektif. Rata-rata rasio efektivitas PAD sebelum pandemi covid-19 sebesar 112,7% termasuk dalam kategori efektif.

Pada rasio efisiensi keuangan daerah, dapat diketahui bahwa semua kabupaten dan kota sebelum pandemi covid-19 termasuk dalam kategori efisien dengan rata-rata rasio efisiensi dibawah 100%. Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah sebelum pandemi covid-19 sebesar 95,3% termasuk dalam kategori efisien.

Rasio keserasian terdiri dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Dari tabel 1 dapat diketahui rasio belanja operasi terendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 62,5%, sedangkan rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kota Banjarmasin sebesar 75,5% dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 65,5%. Pada rasio belanja modal yang terendah yaitu Kabupaten Banjar sebesar 17%, sedangkan rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kota Banjarbaru sebesar 28,5% dengan rata-rata rasio belanja modal sebesar 21,4%.

### **Kinerja Keuangan Daerah Saat Pandemi Covid-19**

Pandemi covid-19 turut memberikan dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada penelitian ini, dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah 13 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi covid-19.

Dari perhitungan pada tabel 2 berikut, dapat diketahui kinerja keuangan daerah 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan saat pandemi covid-19. Pada rasio derajat desentralisasi fiskal, 4 kabupaten termasuk kategori sangat kurang, 8 kabupaten dan kota termasuk dalam kategori kurang, sedangkan Kota Banjarbaru termasuk dalam kategori cukup dengan rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 25%. Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal 13 kabupaten dan kota saat pandemi covid-19 sebesar 12,9% termasuk dalam kategori kurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lantowa & Yahya (2023) yang menyatakan rasio derajat desentralisasi fiskal saat pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021 di

Kabupaten Gorontalo terdapat peningkatan akan tetapi masih dalam kategori kurang. Hasil analisis rasio keuangan tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Rata-Rata Rasio Keuangan Daerah Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021**

| Kabupaten/Kota           | DDF (%)   | KKD (%)   | Efektivitas PAD (%) | REKD (%)     | RBO (%)      | RBM (%)     |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Kab. Tanah Laut          | 13        | 15        | 128                 | 110          | 59           | 18          |
| Kab. Kotabaru            | 11        | 13        | 134                 | 94           | 62           | 14          |
| Kab. Banjar              | 12        | 16        | 105                 | 102          | 66           | 10          |
| Kab. Barito Kuala        | 7         | 8         | 140                 | 100          | 58           | 18          |
| Kab. Tapin               | 9         | 10        | 152                 | 115          | 57           | 27          |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | 17        | 21        | 138                 | 102          | 67           | 17          |
| Kab. Hulu Sungai Tengah  | 12        | 15        | 108                 | 101          | 68           | 9           |
| Kab. Hulu Sungai Utara   | 11        | 12        | 99                  | 106          | 59           | 19          |
| Kab. Tabalong            | 12        | 15        | 87                  | 99           | 67           | 16          |
| Kab. Tanah Bumbu         | 10        | 12        | 90                  | 110          | 65           | 23          |
| Kab. Balangan            | 10        | 11        | 146                 | 108          | 61           | 18          |
| Kota Banjarmasin         | 20        | 26        | 95                  | 103          | 70           | 21          |
| Kota Banjarbaru          | 25        | 34        | 118                 | 99           | 72           | 24          |
| <b>Rata-Rata</b>         | <b>13</b> | <b>16</b> | <b>118,7</b>        | <b>103,7</b> | <b>64,1%</b> | <b>17,9</b> |

Sumber: (DJPK, Hasil Olah Data)

Pada rasio kemandirian keuangan daerah terdapat 11 kabupaten tergolong rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah berada pada rentang 0-25%. Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin termasuk dalam kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rata-rata rasio kemandirian daerah saat pandemi covid-19 sebesar 16% yang termasuk dalam kategori rendah sekali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Onibala dkk. (2021) yang menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah saat pandemi covid-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara termasuk dalam kategori rendah sekali.

Pada rasio efektivitas PAD dapat diketahui terdapat 9 kabupaten dan kota termasuk dalam kategori efektif. Sedangkan 4 kabupaten dan kota termasuk dalam kategori tidak efektif. Rata-rata rasio efektivitas PAD saat pandemi covid-19 sebesar 118,7%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arlina & Pujianto (2023) yang mengungkapkan rasio efektivitas PAD tergolong efektif di masa pandemi covid-19.

Pada rasio efisiensi keuangan daerah, terdapat 4 kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 termasuk dalam kategori efisien, sedangkan 9 kabupaten dan kota lainnya termasuk dalam kategori tidak efisien karena lebih dari 100%. Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah pada saat pandemi covid-19 adalah 103,7% tergolong tidak efisien. Hasil penelitian ini sesuai dengan Onibala dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 rasio efisiensi keuangan daerah dalam kategori tidak efisien.

Pada rasio belanja operasi, nilai terendah yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin sebesar 57,5%, sedangkan rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kota Banjarbaru sebesar 72%. Pada rasio belanja modal, nilai terendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 9,5%, sedangkan rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kabupaten Tapin sebesar 27%.

### **Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19**

Pandemi covid-19 berdampak pada perekonomian global dan Indonesia, sehingga kinerja keuangan daerah juga terpengaruh. Selama pandemi covid-19, pemerintah daerah harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan anggaran yang tersedia.

Pandemi covid-19 memperlihatkan bahwa kinerja keuangan daerah perlu diawasi dan ditingkatkan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Dengan membandingkan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi covid-19, dapat membantu untuk menentukan tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah di masa pandemi covid-19 dan setelahnya.

Mengukur perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan saat pandemi covid-19, setiap rata-rata indikator kinerja keuangan daerah pada saat pandemi covid-19 tahun 2020-2021 dikurangi kinerja keuangan daerah sebelum pandemi covid-19 tahun 2018-2019. Hasil perhitungan perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan saat pandemi covid-19 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Perbedaan Rasio Keuangan Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19**

| Kabupaten/Kota           | DDF (%)    | KKD (%)  | Efektivitas PAD (%) | REKD (%)   | RBO (%)     | RBM (%)     |
|--------------------------|------------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| Kab. Tanah Laut          | 1          | 2        | -11                 | 4          | 0           | -7          |
| Kab. Kotabaru            | 0          | 0        | -1                  | 1          | -3          | -4          |
| Kab. Banjar              | 6          | 8        | 33                  | 7          | 4           | -6          |
| Kab. Barito Kuala        | 3          | 4        | 26                  | 7          | 5           | -10         |
| Kab. Tapin               | 1          | 1        | -15                 | 7          | -4          | 0           |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | 2          | 3        | 42                  | -6         | -3          | -5          |
| Kab. Hulu Sungai Tengah  | 1          | 2        | -8                  | 0          | 4           | -7          |
| Kab. Hulu Sungai Utara   | 4          | 5        | 6                   | 24         | -7          | -1          |
| Kab. Tabalong            | 2          | 1        | 17                  | 28         | -8          | 7           |
| Kab. Tanah Bumbu         | 3          | 4        | -9                  | -1         | 1           | -4          |
| Kab. Balangan            | 1          | 2        | -3                  | 5          | -5          | -3          |
| Kota Banjarmasin         | 4          | 5        | 14                  | 15         | -2          | -4          |
| Kota Banjarbaru          | 0          | 1        | -14                 | 19         | 1           | 1           |
| <b>Rata-Rata</b>         | <b>2,2</b> | <b>3</b> | <b>6</b>            | <b>8,5</b> | <b>-1,3</b> | <b>-3,3</b> |

Sumber: (DJPK, Hasil Olah Data)

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui perbedaan rasio keuangan 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dan saat pandemi covid-19. Pada indikator rasio derajat desentralisasi fiskal cenderung mengalami peningkatan dimana terdapat 11 daerah yang memiliki perbedaan rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum dan saat pandemi covid-19  $\geq 1$ . Rentang peningkatan mulai dari 1% hingga 6%. Sedangkan 2 daerah cenderung bertahan dengan nilai derajat desentralisasi fiskal 0%. Pemerintah pusat cenderung memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola anggaran sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal pemerintah daerah cenderung meningkat dan menjadikan pendapatan asli daerah sebagai pendanaan utama dalam pembangunan daerah.

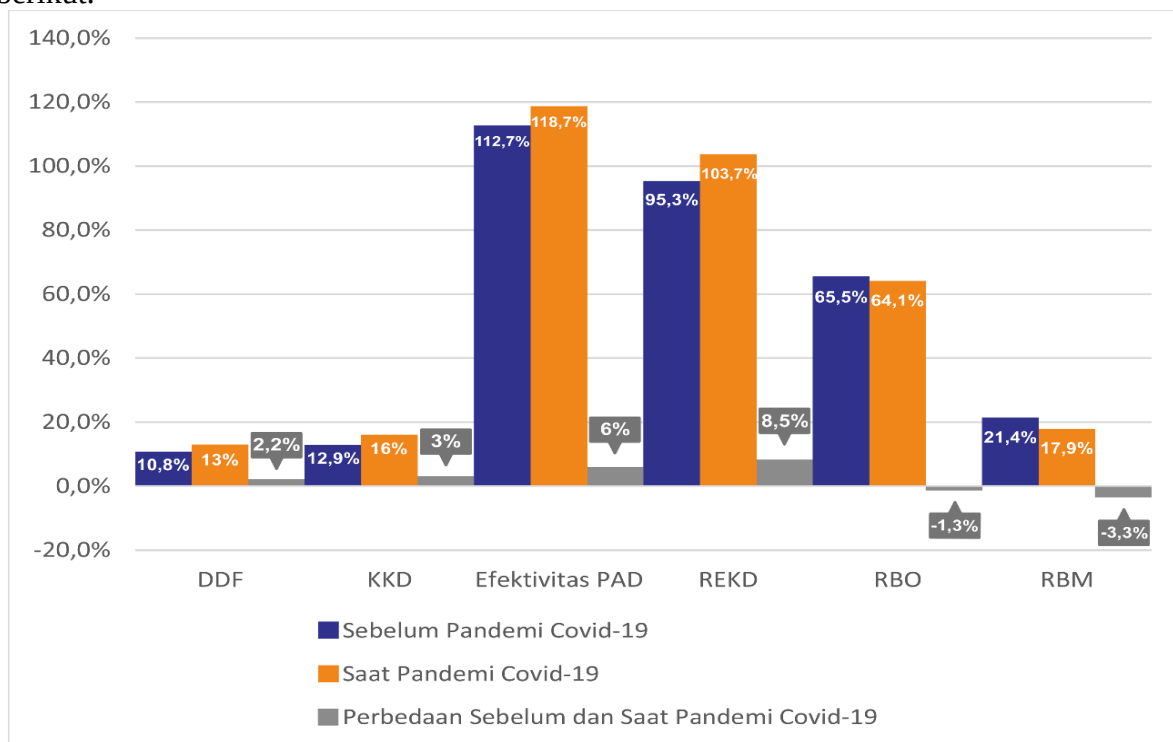
Indikator rasio kemandirian keuangan daerah cenderung mengalami peningkatan juga karena 12 daerah mengalami peningkatan  $\geq 1\%$ . Rentang peningkatan rasio kemandirian daerah mulai dari 1% hingga 8%. Dan 1 daerah cenderung bertahan. Menurunnya dana transfer dari pusat mendorong kemandirian keuangan daerah meningkat sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat menurun.

Indikator rasio efektivitas PAD cenderung mengalami penurunan karena ada 7 daerah dari 13 daerah yang perbedaan rasio efektivitas PAD  $< 0\%$ . Rentang penurunannya mulai dari -1% hingga -15%. Dan 6 daerah cenderung mengalami peningkatan dengan rentang peningkatan mulai dari 6% hingga 42%. Adanya perbatasan ekonomi akibat pandemi covid-19 mengakibatkan kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa menjadi terbatas sehingga permintaan agregat menurun. Menurunnya permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan terpaksa mengurangi upah karyawan bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat. Hal ini mengakibatkan penghasilan masyarakat menurun sehingga konsumsi barang dan jasa juga menurun. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan penurunan permintaan agregat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan pada pendapatan pajak dan PAD.



Indikator rasio efisiensi keuangan daerah cenderung mengalami peningkatan dengan 10 daerah memiliki nilai rasio efisiensi keuangan daerah  $\geq 1\%$ . Rentang peningkatannya mulai dari 1% hingga 28%. Namun, ada 2 daerah yang mengalami penurunan kinerja dengan rentang penurunan dari -1% hingga -6%. Dan 1 daerah cenderung bertahan. Pemerintah daerah cenderung memprioritaskan pengeluaran yang penting dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana dan mengalokasikannya dengan lebih tepat pada hal yang lebih mendesak serta memiliki dampak maksimal bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah.

Sedangkan pada indikator rasio keserasian yakni rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, keduanya cenderung mengalami penurunan. Rasio belanja operasi pada 9 daerah mengalami penurunan dengan rentang penurunan mulai dari -1% hingga -13% serta 1 daerah cenderung bertahan. Dan pada rasio belanja modal 10 daerah mengalami penurunan dengan rentang penurunan mulai dari -1% hingga -10% serta 1 daerah cenderung bertahan. Penurunan pendapatan daerah saat pandemi covid-19 menyebabkan pemerintah daerah cenderung mengurangi belanja operasi dan belanja modal agar tidak terjadi defisit. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja untuk menangani keadaan darurat dalam upaya penanggulangan covid-19 sehingga menerapkan kebijakan pembatasan belanja dengan memotong belanja operasi dan belanja modal untuk mengurangi pengeluaran. Perbedaan rata-rata rasio keuangan daerah 13 Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



**Gambar 3. Perbedaan Rata-Rata Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19**

Sumber: DJPK, Diolah Kembali

Berdasarkan gambar 3, dapat diketahui rata-rata perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan saat pandemi covid-19 pada 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator rasio derajat desentralisasi fiskal saat pandemi covid-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi covid-19 cenderung mengalami peningkatan karena memiliki perbedaan  $\geq 1\%$  sebesar 2,2%. Sedangkan indikator rasio kemandirian keuangan daerah cenderung mengalami peningkatan juga sebesar 3%. Begitu pula rata-rata indikator rasio efektivitas PAD

juga mengalami peningkatan sebesar 6% serta indikator rasio efisiensi keuangan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 8,5%.

Berbeda dengan keempat rasio keuangan tersebut, indikator rasio keserasian yakni rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, keduanya mengalami penurunan. Rasio belanja operasi mengalami penurunan sebesar -1,3% dan pada rasio belanja modal mengalami penurunan sebesar -3,3%.

## **PENUTUP**

### **Implikasi Penelitian**

Perhitungan lima rasio keuangan di masa pandemi covid-19 diketahui bahwa, pada rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah. Kedua, pada rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah pusat memotong anggaran ke daerah. Ketiga, pada rasio efektivitas PAD sebagian besar daerah mengalami penurunan PAD karena adanya perbatasan aktivitas ekonomi. Keempat, pada rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah daerah memprioritaskan pengeluaran yang penting dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu agar tidak terjadi defisit. Kelima, pada rasio keserasian sebagian pemerintah daerah menurunkan belanja operasi dan belanja modal.

### **Keterbatasan Penelitian**

Adanya keterbatasan data sehingga periode penelitian hanya 4 tahun saja yaitu tahun 2018-2021.

### **Kesimpulan**

Kinerja keuangan daerah sebelum pandemi covid-19 dibandingkan saat pandemi covid-19 berdasarkan rata-rata rasio desentralisasi fiskal 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 2,2%. Rasio kemandirian keuangan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 3%. Rasio efektivitas PAD mengalami peningkatan sebesar 6%. Rasio efisiensi keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 8,5%. Rasio keserasian yakni rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, keduanya mengalami penurunan dimana pada rasio belanja operasi sebesar -1,3% dan pada rasio belanja modal mengalami penurunan sebesar -3,3%.

Pandemi covid-19 berdampak terhadap ekonomi karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi sehingga menurunkan kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan turunnya pendapatan masyarakat. Menurunnya pendapatan menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat sehingga tingkat konsumsi masyarakat dalam perekonomian menurun dan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 meskipun pertumbuhannya lemah.

### **Saran**

Pertama, bagi pemerintah pusat dapat mengkaji dengan baik bagaimana transfer ke daerah dilakukan. Bantuan dana transfer pusat ke daerah sangat berarti bagi pemerintah daerah pada saat mengalami krisis di masa pandemi covid-19. Kedua, bagi pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya komprehensif untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Sudirman, I. W. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Prenada Media.
- Agnika, M., Putra, S. S., & Sudradjat. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493–503. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3040>
- Arfah, K. A., Risfaisal, R., & Pebrianti, F. (2021). Peran Pendapatan Daerah Terhadap Pasar Cakke Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid-19

- (Studi Kasus Kec. Anggeraja Kab. Enrekang). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 208–214. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i2.5225>
- Arlina, M. T., & Pujiyanto. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kota Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19*. 1(1), 147–160.
- Farhani, F., & Rosnidah, I. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011- 2015). “*REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi*,” 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.33603/reformasi.v3i1.1788>
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1320–1329. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.395>
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Kamaluddin. (2018). MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Kajian tentang Penggunaan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya di Era Otonomi Daerah). *INA-Rxiv*, 1–9.
- Lantowa, F. D., & Yahya, I. W. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 6(1), 20–30. <https://doi.org/10.52353/ama.v16i1.394>
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., & Maulana, A. (2021). The government’s fiscal policy strategy to improve the economy of Indonesia in the covid-19 pandemic period. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197.
- Nasrum, D. M. (2018). *Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89. <https://doi.org/10.35794/jpekd.35097.22.2.2021>
- Pasaribu, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. *Akuntabilitas*, 15(1), 137–154. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12054>
- Puteri, W., & Sa’roni, C. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 449–462. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i2.1185>
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap kesehatan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Syauqi, M., Siregar, H., & Syaukat, Y. (2019). Strategi Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas

- 
- Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pengelolaan Apbd. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1), 1–16. [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v9i1.27540](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i1.27540)
- Vebiani, D., Nugraha, & Hardiana, R. D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 113–126.
- Yayu, & Saipudin. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kotabaru. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 415–428.
- OECD. (2020). The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments: Main findings from the joint CoR-OECD survey. *OECD Regional Development Papers*, 5.